

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PREMBUN

Jin Jeruk NO: 5 Telp (0287)662321 E-mail kec-prembun @kebumen go id

KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 865.1/.04...

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
 Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa guna melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2024 dengan Keputusan Camat Prembun.

Mengingat

- Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 3 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021
 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten kebumen.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG Menetapkan

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN

PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024.

Prembun Kabupaten : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan **KESATU**

Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, menjadi acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sesuai dengan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini **KEDUA**

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kebupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan . **KETIGA**

Ditetapkan di

: Prembun

pada tanggal

: 15 Januari 2024

CAMATREMBUN

RTINUS YUDANTORO.S.STP.M.Si NIP 198208232000121002

TEMBUSAN:

- Bupati Kebumen;
- 2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
- Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
- Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen;

Lampiran : Keputusan Camat Prembun

Kabupaten Kebumen

Nomor : 865.1/ 04

Tanggal: 15 Januari 2024

1. Nama Unit Organisasi :

: Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen

2. Tugas

Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

3. Fungsi

: a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

 d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

 i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendMirit dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

 j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan;

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Individu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)	5 Dokumen
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP)	6 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	18 Orang
	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	4 Dokumen
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terlaksananya Penyadiaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan
	Belanja Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyimpanan Arsip	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	12 Bulan
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi tamu)	3 Unit
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	12 Bulan
6	Terlaksananya Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	14 Unit
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralataan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6 Unit
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit
7.	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	
	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, KIA, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekomendasi, Legalisasi Umum)	9 Jenis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Jenis
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan hari Jadi Kebumen	2 Kegiatan
9.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12 Desa
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	1 Desa
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Desa
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	2 Dokumen
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes dan musrenbangcam	2 Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat)	4 Kegiatan
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Verval DTKS dan Bansos Sembako)	2 Kegiatan